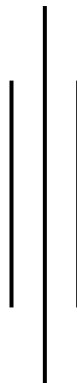


PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau ini dapat tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2019. **Laporan ini Memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.**

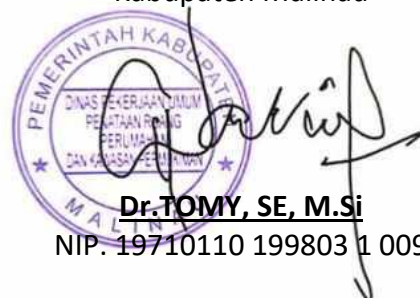
Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, baik untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman maupun Pemerintah Kabupaten Malinau guna perbaikan program dan kegiatan kedepan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini.

Malinau, 08 Januari 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau



Dr. TOMY, SE, M.Si
NIP. 19710110 199803 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau 2016-2021. Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yaitu :

“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG TERPADU MELALUI PEMANFAATAN RUANG YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN”.

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau adalah :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta tata kelola organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Menyediakan Perencanaan Pembangunan dibidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman Serta Pertanahan.
3. Menyelenggarakan Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Menyelenggarakan Pembangunan dan Meningkatkan Kualitas jaringan jalan dan jembatan.
5. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan tani, sumberdaya air dan irigasi guna mendukung program Ketahanan Pangan dan Rasda, dengan pendayagunaan sumber daya air, konservasi sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air.

6. Meningkatkan peran penataan ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan daerah.
7. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi spasial daerah dalam rangka percepatan perwujudan kebijakan satu peta
8. Meningkatkan pelayanan dibidang pertamanan, pemakaman dan ketenagalistrikan.
9. Menyediakan Ruang Terbuka Publik yang proporsional sehingga terwujud ruang aktivitas publik yang nyaman dan berkelanjutan
10. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan pertanahan yang tertib, teratur dan berkeadilan

Dalam rangka pelaksana tugas pemerintah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata laksana pemerintah yang baik dan benar serta meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Tujuan :

Untuk meningkatkan ketatalaksanaan, kelembagaan. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia;
- Meningkatkan Manajemen Kelembagaan;
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja.

2. Memenuhi kebutuhan Prasarana Jalan dan Jembatan yang nyaman untuk memperlancar transportasi guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

Tujuan :

Untuk membangun, memelihara dan meningkatkan Prasarana Jalan dan Jembatan

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik;
- Meningkatkan Aksesibilitas terhadap Wilayah-wilayah Tertinggal atau Terisolir;
- Meningkatkan Daya Dukung Prasaran Jalan dan Jembatan.

3. Memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air dan Irigasi Masyarakat Kabupaten Malinau.

Tujuan :

Untuk meningkatkan Pelayanan dan Ketersediaan Sumber Daya Air Baku.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang memperoleh Layanan Air Baku;
 - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air;
 - Meningkatkan daya dukung Prasarana Sumber Daya Air;
 - Melindungi Kawasan Permukiman dan Produksi terhadap bahaya Banjir.
4. Memenuhi Prasarana dan Sarana Dasar Gedung Pada Kawasan Perkotaan berlandaskan asas manfaat, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan dan lingkungan.

Tujuan :

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan lingkungan serta gedung pemerintah. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan pelayanan Perumahan dan Pemukiman bagi Masyarakat;
 - Meningkatkan daya dukung Prasarana keciptakarya.
5. Memenuhi terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan
- Tujuan :
- Terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal.
 - Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang
 - Terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan kabupaten yang memenuhi standar dan terintegrasi.
6. Memenuhi peningkatan kuantitas dan kualitas taman kota dan Ruang Terbuka Hijau yang bersih, asri, dan nyaman serta meningkatkan kuantitas dan kualitas taman pemakaman umum.
- Meningkatkan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah
 - Terciptanya kualitas dan kuantitas RTH sebagai RTH
 - Meningkatkan kinerja bidang pemakaman sebagai pendukung RTH aktif dan layanan masyarakat terhadap kebutuhan lahan makam.
 - Meningkatkan penerangan kota yang hemat energi dan berwawasan lingkungan
7. Mengembangkan infrastruktur pertanahan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan pertanahan
- Peningkatan infrastruktur peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah serta mengurangi potensi sengketa tanah.
 - Pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Peningkatan kinerja layanan pertanahan.
 - Penegakan hukum terkait pertanahan serta mengurangi jumlah tanah-tanah terlantar.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau pada tahun 2019 adalah **94,04 %** atau sebesar **Rp.139.763.716.629,00** (seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dari Total Pagu Anggaran sebesar **Rp. 144.385.914.069,00** (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Persentase berdasarkan Pagu Anggaran

NO.	BIDANG	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	SEKRETARIAT	4.511.980.000,00	4.407.990.290,00	97,70
2	BINA MARGA	66.438.679.960,00	65.575.392.296,00	98,70
3	CIPTA KARYA	38.338.150.089,00	37.760.540.351,00	98,49
4	SUMBER DAYA AIR	9.647.776.180,00	6.866.558.063,00	71,17
5	TATA RUANG	1.374.064.500,00	1.359.549.090,00	98,94
6	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	5.957.193.340,00	5.913.122.340,00	99,26
7	PERTANAHAN	500.000.000,00	445.578.320,00	89,12
8	UPTD	17.618.070.000,00	17.434.985.879,00	98,96
	TOTAL	144.385.914.069,00	139.763.716.629,00	94,04

Belum Optimalnya Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau pada tahun 2019 baru sebanyak 85 orang.

2. Adanya Perubahan Perencanaan Kegiatan yaitu Kegiatan yang awalnya adalah Perencanaan Jembatan Gantung Turan Mas Tanjung Lapang dalam hal ini kegiatan perencanaan Jembatan Gantung Turan Mas Tanjung Lapang adalah untuk menghubungkan Desa Tanjung Lapang dan Turan Mas sebagai wilayah sentra produksi pertanian, namun dalam RDTR Provinsi Kalimantan Utara, wilayah Desa Tanjung Lapang dan Turan Mas masuk dalam perencanaan jalur jalan provinsi yang menghubungkan jalan Nasional Ruas Malinau (Jembatan Malinau I) Long Bawan yaitu di titik simpul Simpang Sembuak Warod (Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara). Pada RDTR Kabupaten Malinau juga telah direncanakan penyesuaian dengan RDTR Provinsi yang menetapkan bahwa kedua wilayah tersebut akan dihubungkan dengan jalan Provinsi sampai jalan poros Nasional Ruas Malinau – Long Bawan sehingga perencanaan jembatan gantung tipe sederhana tidak mampu mendukung gerakan arus transportasi kendaraan jenis mobil dan kendaraan berat lainnya .

Pada Kegiatan Kelanjutan Penyirangan Jembatan Lidung Kemenci, berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh tenaga ahli Univ. Borneo yang di inisiasi oleh PT. Karya Jaya indah selaku rekanan. Merekomendasikan untuk tidak melanjutkan pekerjaan pemancangan karena sudah terjadi perubahan morfologis sungai sehingga apabila dilakukan pemancangan akan mengakibatkan gerusan pada daerah pancangan yang akan mengakibatkan regangan atau penurunan tanah (settlement) .

Capaian Kinerja Sasaran (Outcome) rata-rata 100%.

Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pembangunan Kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan lebih intensif melalui Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
2. Melakukan Finalisasi nilai anggaran sebelum melakukan pengimputan nilai DPA.
3. Melalui LKJIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi yang telah bergulir menghendaki terselenggaranya Pemerintahan yang bertanggung jawab dan bebas dari pengaruh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masyarakat sebagai salah satu stakeholder akan semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-hak sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi public dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan Pemerintahan yang bersih (Good Governance) dalam sebuah organisasi akan menjadi hal yang sangat penting bagi penyelenggara dimata publik. Sebagai salah satu pilar Pemerintahan yang bersih, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan public terhadap penyelenggara aktifitas organisasi.

Tuntutan reformasi tersebut diatas telah diakomodasikan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI / MPR/ 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 perihal yang sama. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir Tahun Anggaran.

Dilandas kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya akuntabilitas public baik bagi management maupun bagi stakeholders, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 yang merupakan pertanggung jawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.1.2. Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber daya Air, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.
2. Penyusunan Perencanaan bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber daya Air, Penataan ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber daya Air, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.
4. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Cipta karya, Bina Marga, Sumber daya Air, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.
5. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
7. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tugas dan Fungsinya

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 diuraikan Susunan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan Sub :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Penyusunan Program
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Penataan Bangunan
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih
 - c. Seksi Perumahan dan Permukiman.
4. Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Bangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Sumber daya Air terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Perencanaan Pengembangan SDA dan Irigasi
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa
 - c. Seksi Sumber Daya Air.
6. Bidang Tata Ruang:
 - a. Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan
 - b. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
7. Bidang Pertamanan dan Pemakaman:
 - a. Seksi Pertamanan
 - b. Seksi Pemakaman
 - c. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan

8. Bidang Pertanahan:
 - a. Seksi Pengadaan Tanah
 - b. Seksi Pengukuran Tanah
 - c. Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2019 dapat dilihat pada halaman berikut ini :

1.3 Sumber Daya Aparatur

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau per 31 Desember 2019, memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 302 (tiga ratus dua) orang yang terdiri dari 85 (seratus lima) orang PNS, 1 (satu) orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan 82 (delapan puluh dua) staf pelaksana kegiatan / Honor Proyek dan Tenaga Lapangan UPTD, dan 135 (seratus tiga puluh lima) Tenaga Lapangan, Pertamanan dan Pemakaman.

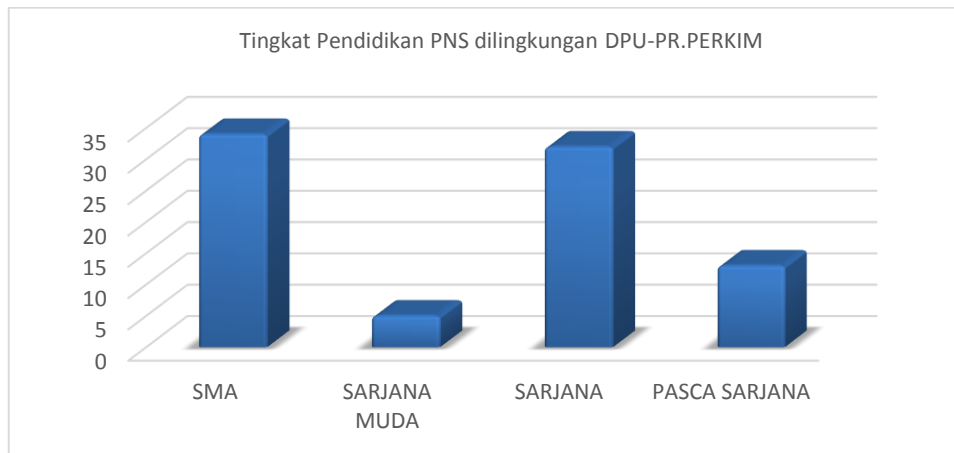
Berdasarkan analisis beban kerja di dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan karena adanya struktur yang masih lowong, disamping itu dari segi keahlian teknis perencanaan pegawai yang ada masih belum memadai.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	6
4	Kepala UPTD	1
5	Kepala Sub Bidang	4
6	Kepala Seksi	18
7	Staf	54
8	Honoror	82
9	Petugas Lapangan	135
	Total	302

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Nama OPD	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Sarjana Muda	Sarjana	Pasca Sarjana	
1	DPU-PR.PERKIM	34	5	32	13	84



Grafik 1.3.1

Tabel 1.3.2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Nama OPD	Kualifikasi Golongan				Jumlah
		Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	
1	DPU-PR.PERKIM	0	34	44	6	84

1.4 LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.
2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor).
3. Pembiayaan (Anggaran).
4. Komitmen Pimpinan Organisasi.
5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan Teknis.
Jumlah kegiatan yang ada tidak sebanding dengan tenaga Teknis.
2. Belum memadainya Sarana dan Prasarana untuk menunjang pekerjaan – pekerjaan teknis.
3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada.

Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Konsultan dan Kontraktor.
2. Dinas, Badan, Departemen dan Lembaga terkait lainnya.
3. Komitmen Lembaga Legislatif (DPRD).
4. Komitmen Pimpinan Daerah.
5. Kondisi alam / lingkungan.

b. Ancaman

1. Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan maupun tenaga ahli.
2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.
3. Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal.
4. Bencana Alam (Longsor, Banjir, dan lain-lain).

2 Alur Pikir Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau selama Tahun Anggaran 2019, yang mana Capaian Kinerja (*Performance Result*) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) Tahun 2020, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi.

Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah Rencana Kerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

2.1. RENCANA STRATEGIK

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. VISI DAN MISI

Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dijabarkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Terpadu melalui Pemanfaatan Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan”.

Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau ke depan.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau sebagaimana telah digariskan diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta tata kelola organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Menyediakan Perencanaan Pembangunan dibidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber daya Air, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman Serta Pertanahan.
3. Menyelenggarakan Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Menyelenggarakan Pembangunan dan Meningkatkan Kualitas jaringan jalan dan jembatan.
5. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan tani, sumberdaya air dan irigasi guna mendukung program Ketahanan Pangan dan Rasda, dengan pendayagunaan sumber daya air, konservasi sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air.
6. Meningkatkan peran penataan ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan daerah.
7. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi spasial daerah dalam rangka percepatan perwujudan kebijakan satu peta
8. Meningkatkan pelayanan dibidang pertamanan, pemakaman dan ketenagalistrikan.
9. Menyediakan Ruang Terbuka Publik yang proporsional sehingga terwujud ruang aktivitas publik yang nyaman dan berkelanjutan
10. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan pertanahan yang tertib, teratur dan berkeadilan

2.1.2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan yang dimaksudkan didalam LKJIP ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 : Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI :			
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun			
MISI III :			
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten	Terwujudnya peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun di perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan pembangunan jalan dan jembatan • Meningkatkan kuantitas jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan skala prioritas penanganan jalan dan jembatan.
	Meningkatnya pemeliharaan jalan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Survey kondisi jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeliharaan

	jembatan baik di perkotaan maupun di perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan 	jalan dan jembatan.
	Meningkatnya fungsi saluran drainase dalam mendukung infrastruktur jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Survey saluran drainase jalan • Meningkatkan saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan peningkatan drainase.
2. Mewujudkan peningkatan akses desa terhadap air bersih	Terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan skala prioritas penanganan • Penyediaan air bersih dan air minum dengan meningkatkan partisipasi RT dan dunia usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan kumuh kabupaten.

2.2. RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

2.2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Adapun komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau meliputi :

Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra yang akan diwujudkan pada tahun 2019 beserta indikator dan rencana tingkat capaian (targetnya).

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong –Gorong
7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
11. Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Umum
13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
15. Program Pembangunan Sanitasi Permukiman
16. Program Perencanaan Tata Ruang

Program

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi lembaga yang bersangkutan Adapun program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2019 sebanyak 16 program, yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong –Gorong
7. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
8. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
9. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
10. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Umum
13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
15. Program Pembangunan Sanitasi Permukiman
16. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan

Adapun Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 sebanyak 114 kegiatan, meliputi :

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor
3	Penyediaan alat tulis kantor
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5	Penyediaan bahan logistik kantor
6	Penyediaan makanan dan minuman
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
8	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
9	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan (UPTD PU)
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPTD PU)

11	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (UPTD PU)
12	Penyediaan Makan dan Minum (UPTD PU)
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (UPTD PU)
14	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (UPTD PU)
15	Penyediaan Material Kerja UPTD PU
16	Belanja BBM Alat Berat 4 Kecamatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas DPRD
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (UPTD PU)
21	Pengadaan Peralatan Kantor DPUPR-PERKIM

	Program peningkatan disiplin aparatur
22	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (UPTD PU)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23	Peningkatan SDM Aparatur DPUPR-PERKIM
	Program pembangunan jalan dan jembatan
24	Peningkatan Jalan Swadaya - Simpang Jalan Inhutani
25	Peningkatan Jalan menuju Puskesmas Tanjung Lapang
26	Rehab Jembatan Gantung Lalut Birai Kec. Bahau Hulu
27	Perencanaan Jembatan Gantung Turan Mas Tanjung Lapang
28	Peningkatan Jalan RT 4 Pulau Betung
29	Perencanaan Jalan Lingkungan RT.15 Malinau Kota
30	Peningkatan Jalan Jembatan Singai Terang Menuju Desa Mentarang Baru (No. 243) (DAK REGULER)
31	Penunjang Peningkatan Jalan Jembatan Singai Terang Menuju Desa Mentarang Baru (No. 243) (DAK REGULER)

32	Peningkatan Jalan RSUD-SPP-Poros Provinsi (No. 204) (DAK REGULER)
33	Penunjang Peningkatan Jalan RSUD-SPP-Poros Provinsi (No. 204) (DAK REGULER)
34	Peningkatan Jalan Simpang Panembahan - Jalan Samping Stadion (No.029) (DAK REGULER)
35	Penunjang Peningkatan Jalan Simpang Panembahan - Jalan Samping Stadion (No.029) (DAK REGULER)
36	Penunjang Peningkatan Jalan Kuala Lapang CS. (No. 100-110) (DAK REGULER)
37	Peningkatan Jalan Kuala Lapang CS. (No. 100-110) (DAK REGULER)
38	Penunjang Peningkatan Jalan Samping Stadion - Jalan Hauling Batu Bara (No. 085) (DAK REGULER)
39	Peningkatan Jalan Long Pujungan- Long Aran (No. 250) (DAK PENUGASAN)
40	Penunjang Peningkatan Jalan Long Pujungan- Long Aran (No. 250) (DAK PENUGASAN)
41	Peningkatan Jalan Simpang Nasional - Long Payau (No. 276) (DAK PENUGASAN)
42	Penunjang Peningkatan Jalan Simpang Nasional - Long Payau (No. 276) (DAK PENUGASAN)
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

43	Pembangunan Jalan Drainase Jalan Poros desa tanjung keranjang
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
44	Pengadaan dan Pemasangan Patok Beton Tanah Aset Pemda Malinau
45	Persertifikatan Tanah Aset Pemda Malinau
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
46	Pemeliharaan PJU TS Kab. Malinau
47	Instalasi Listrik (Hut ke-19 & Irau Ke-9)
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
48	Pemeliharaan Jalan Kabupaten Malinau
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
49	Pengadaan Kendaraan dan Alat Berat UPTD DPUPR-PERKIM
50	Pengadaan Alat Berat Motor Grader dan Excavator
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
51	Pemeliharaan Kanal Kabupaten Malinau

	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
51	Normalisasi Sungai Kaliamok Malinau Utara
52	Kelanjutan Penyiringan Jembatan Lidung Kemenci
53	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Lidung Keminci (DAK REGULER)
54	Penunjang Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Lidung Keminci (DAK REGULER)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Umum
55	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan dan Pemakaman Umum
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
56	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III)
57	Pembangunan Baru Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Layanan Air Minum (DAK AFIRMASI)
58	Penunjang Pembangunan Baru Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Layanan Air Minum (DAK AFIRMASI)
59	Perluasan dan Peningkatan SPAM Kabupaten Malinau (DAK PENUGASAN)
60	Penunjang Perluasan dan Peningkatan SPAM Kabupaten Malinau (DAK PENUGASAN)

61	Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
62	Penunjang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS APBN)
63	Penunjang Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (KOTAKU)
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
64	Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Mentarang
65	Rehab Kolam Renang Kabupaten Malinau
66	Rehab Gedung Christian Center
67	Rehab Gedung Islamic Center
68	Rehab Stadion Kab. Malinau
69	Perencanaan Kuburan Muslim Raja Tua Kec. Mentarang
70	Rehab Berat Mess Kec. Bahau Hulu
71	Rehab Berat Rumah Dinas DPRD

72	Perencanaan Panggung Kesenian, Sarana Olahraga & Landscape dilapangan Pro Sehat Pelangi Intimung
73	Pembangunan Panggung Kesenian dan Sarana Olah Raga di Lapangan Pro Sehat Pelangi Intimung
74	Penataan Jalan Lingkungan Perdesaan di 15 Kecamatan
75	Rehab Gedung Perwakilan Malinau di Jakarta
76	Pembangunan Baru Bantuan Pembangunan Perumahan Baru Masyarakat (DAK AFIRMASI)
77	Penunjang Pembangunan Baru Bantuan Pembangunan Perumahan Baru Masyarakat (DAK AFIRMASI)
	Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman
78	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S) (DAK PENUGASAN)
79	Penunjang Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S) (DAK PENUGASAN)
80	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S) (DAK AFIRMASI)
81	Penunjang Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S) (DAK AFIRMASI)
82	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S) (DAK REGULER)

83	Penunjang Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S) (DAK REGULER)
	Program Perencanaan Tata Ruang
84	Revisi RTRW Kab. Malinau
85	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Malinau

2.2.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok :

- a. **Masukan (*Inputs*)** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. **Keluaran (*Outputs*)** adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. **Hasil (*Outcome*)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat; Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Penetapan

indikator kinerja kegiatan di atas didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir.

Indikator kinerja dimaksud dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah:

- (1) spesifik dan jelas,
- (2) dapat diukur secara obyektif,
- (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan
- (4) tidak bisa.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana

diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat lima tahapan penetapan, yaitu:

1. Penyiapan dokumen Rencana Strategik,
2. Penyiapan dokumen Rencana Kinerja Tahunan,
3. Penetapan Kinerja (PK) atas rencana kinerja tahunan yang sudah dibakukan,
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yaitu penilaian tingkat pencapaian target masing-masing sasaran,
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), yaitu penilaian terhadap tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan.

3.1.2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan (2) data eksternal, berasal dari luar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu pada tahun-tahun ke depan, perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

➤ **EVALUASI KINERJA**

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Dalam hal ini hasil evaluasi kinerja pada tahun 2019 mengalami kendala pada beberapa kegiatan, yaitu kegiatan Perencanaan Jembatan Gantung Turan Mas Tanjung Lapang dan Kelanjutan Penyiringan Jembatan Lidung Keminci, Pada Kegiatan Perencanaan Jembatan Gantung Turan Mas Tanjung Lapang mengalami kendala yaitu dalam RDTR Provinsi Kalimantan Utara, wilayah Desa Tanjung Lapang dan Turan Mas masuk dalam perencanaan jalur jalan provinsi yang menghubungkan jalan Nasional Ruas Malinau (Jembatan Malinau I) Long Bawan yaitu di titik simpul Simpang Sembuak Warod (Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara). Pada RDTR Kabupaten Malinau juga telah direncanakan penyesuaian dengan RDTR Provinsi yang menetapkan bahwa kedua wilayah tersebut akan dihubungkan dengan jalan Provinsi sampai jalan poros Nasional Ruas Malinau – Long Bawan sehingga perencanaan jembatan gantung tipe sederhana tidak mampu mendukung gerakan arus transportasi kendaraan jenis mobil dan kendaraan berat lainnya.

Sedangkan pada Kegiatan Kelanjutan Penyiringan Jembatan Lidung Kemenci, berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh tenaga ahli Univ. Borneo yang di inisiasi oleh PT. Karya Jaya indah selaku rekanan. Merekomendasikan untuk tidak melanjutkan pekerjaan pemancangan karena sudah terjadi perubahan morfologis sungai sehingga apabila dilakukan pemancangan akan mengakibatkan gerusan pada daerah pancangan yang akan mengakibatkan regangan atau penurunan tanah (settlement).

➤ **ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

• **Kinerja Kegiatan**

Rincian Pengukuran Kinerja Kegiatan tiap program masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan 85 (Delapan Puluh Lima) kegiatan strategik yang terangkum dalam 16 (enam belas) Program.

Keberhasilan masing-masing kegiatan strategik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2019 dan keterkaitannya dengan keberhasilan Program serta pencapaian Sasaran dapat dilihat pada Tabel Ikhtisar berikut ini :

Ikhtisar Pencapaian Keberhasilan Program dan Kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Pelaksanaan		Ket.
			Berhasil (v)	Tidak Berhasil (v)	
Sasaran 1	Program 1				
		Kegiatan 1	v		
		Kegiatan 2	v		
		Kegiatan 3	v		
		Kegiatan 4	v		
		Kegiatan 5	v		
		Kegiatan 6	v		
		Kegiatan 7	v		
		Kegiatan 8	v		
		Kegiatan 9	v		
		Kegiatan 10	v		

		Kegiatan	11	√		
		Kegiatan	12	√		
		Kegiatan	13	√		
		Kegiatan	14	√		
		Kegiatan	15	√		
		Kegiatan	16	√		
	Program 2					
		Kegiatan	17	√		
		Kegiatan	18	√		
		Kegiatan	19	√		
		Kegiatan	20	√		
	Program 3					
		Kegiatan	21	√		
	Program 4					
		Kegiatan	22	√		
	Program 5			√		
		Kegiatan	23	√		
		Kegiatan	24	√		
		Kegiatan	25	√		
		Kegiatan	26		√	Perubahan Perencanaan Kegiatan
		Kegiatan	27	√		
		Kegiatan	28	√		
		Kegiatan	29	√		
		Kegiatan	30	√		
		Kegiatan	31	√		
		Kegiatan	32	√		
		Kegiatan	33	√		
		Kegiatan	34	√		
		Kegiatan	35	√		
		Kegiatan	36	√		
		Kegiatan	37	√		
		Kegiatan	38	√		
		Kegiatan	39	√		

		Kegiatan	40	√		
		Kegiatan	41	√		
		Kegiatan	42	√		
	Program 6					
		Kegiatan	43	√		
	Program 7					
		Kegiatan	44	√		
		Kegiatan	45	√		
	Program 8					
		Kegiatan	46	√		
		Kegiatan	47	√		
	Program 9					
		Kegiatan	48	√		
	Program 10					
		Kegiatan	49	√		
		Kegiatan	50	√		
	Program 11					
		Kegiatan	51	√		
		Kegiatan	52		√	Perubahan Morpologis Sungai
		Kegiatan	53	√		
		Kegiatan	54	√		
	Program 12					
		Kegiatan	55	√		
	Program 13					
		Kegiatan	56	√		
		Kegiatan	57	√		
		Kegiatan	58	√		
		Kegiatan	59	√		
		Kegiatan	60	√		

		Kegiatan	61	√		
		Kegiatan	62	√		
		Kegiatan	63	√		
	Program 14					
		Kegiatan	64	√		
		Kegiatan	65	√		
		Kegiatan	66	√		
		Kegiatan	67	√		
		Kegiatan	68	√		
		Kegiatan	69	√		
		Kegiatan	70	√		
		Kegiatan	71	√		
		Kegiatan	72	√		
		Kegiatan	73	√		
		Kegiatan	74	√		
		Kegiatan	75	√		
		Kegiatan	76	√		
		Kegiatan	77	√		
	Program 15					
		Kegiatan	78	√		
		Kegiatan	79	√		
		Kegiatan	80	√		
		Kegiatan	81	√		
		Kegiatan	82	√		
		Kegiatan	83	√		
	Program 16					
		Kegiatan	84	√		
		Kegiatan	85	√		

- **Pencapaian Atas Penetapan Kinerja**

Realisasi Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau pada dasarnya sama dengan Pencapaian Kinerja Kegiatan mengingat data yang digunakan keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu DPA.

- **Aspek Anggaran**

Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 adalah Rp144.385.914.069,00

secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tergolong belum maksimal karena hanya mampu menyerap anggaran Rp 139.763.716.629,00 dengan progres 94,04 %

dari alokasi anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 165.070.504.041,00 dengan progres 98,01 %. Hal-hal yang dapat dijadikan catatan penting untuk dapat dilakukan pada Tahun 2020 adalah meningkatkan pencapaian kinerja/outcome, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun eksternal di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman sehingga kegiatan dapat terselenggara sesuai target.
2. Penajaman TOR/KAK kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran 2020 sehingga penyelenggaraan dapat berjalan sesuai rencana.
3. Akurasi dalam pengimputan nilai DPA harus sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
4. Pengimputan nilai DPA harus benar-benar sesuai dengan ketersediaan dana yang ada Penentuan skala prioritas kegiatan yang segera untuk dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2019. LAKIP ini di susun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 239/9/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau telah dapat mencapai 16 (enam belas) Sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik.

B. Langkah Perbaikan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau akan mengupayakan langkah perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau;
2. Peningkatan Manajemen Koordinasi Penyusunan Rencana Program Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau;
3. Peningkatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau.

Dengan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau ini, diharapkan dapat memacu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, untuk lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malinau yang aman, Nyaman, dan Damai, melalui Program Pemerintah Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).